

References

- Almeida, E. P. (2011). Palestinian and Israeli Voices in Five Years of U.S. Newspaper Discourse. *International Journal of Communication* 5 .
- Chadwick, A., Bahr, H.M., & Albrecht, S. L. (1991). *Social Research Methods*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Dellinger, B. (1995). *Critical Discourse Analysis* retrieved Nov. 23, 2012, from <http://users.utu.fi/bredelli/cda.html>
- Devereux. E. (2003). *Understanding the Media*. Cornwall: TJ International Ltd.
- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: Lkis.
- Doranyi, Z. (2007). *Research Methods in Applied Linguistics*. New York: Oxford University Press.
- Fairclough, N, & Wodak, R. (1997). Discourse as Social Interaction in van Dijk, T.A.(Ed.). *Critical Discourse Analysis* (pp. 258 – 284). London: SAGE Publication Ltd.
- Fairclough, N. (2003). *Analysis Discourse: Textual Analysis for Social Research*. London: Routledge.
- N, L. H. (2010). The Importance of Being Literate. *Student Journal of Media Literacy Education*, Issue 1, Volume 1.

- Nugroho, W. (2009). *Word-Choice Of headline news On Muslim Issues Used in The Jakarta Post*. Thesis, English Letters and Language Department, Humanities and Culture Faculty, The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Rahmatika, R. (2008). *Microstructure Strategy in Buletin Da'wah Al Islam by Hizbut Tahrir Indonesia*. Thesis, Airlangga University, Surabaya.
- Reah, D. (2004). *The Language of Newspapers*. London: Routledge.
- Sadaf, A. (2011). *Public Perception of Media Role*, International Journal of Humanities and Social Science Vol. 1 No. 5; May 2011
- Silverblatt, A. (2004). *Media as Social Institution*, American Behavioral Scientist, Vol 48, No 1, September 2004, pages 35-41, Sage Publications.
- Van Dijk, T. A. (1997). (Ed). *Discourse as Interaction in Society*. In *Discourse as Social Interaction*. London : Oxford.
- Van Dijk, T. A. (2004). *Ideology and Discourse Analysis*. Oxford University. In press.
- Van Dijk, T.A. (1995). *Power and the News Media*. In D. Paletz (Ed.), *Political communication and action*. (pp. 9-36). Cresskill, NJ: Hampton Press.

KPK Segera Verifikasi Laporan Dipo Alam

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memverifikasi laporan dugaan kongkalikong antara kementerian dan DPR yang disampaikan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Saat ini, berkas laporan tersebut

masih berada di Direktorat Pengaduan Masyarakat.

"Tentu akan ditelaah lebih lanjut. Namun, sebelumnya perlu verifikasi dan validasi atas laporannya dulu," kata Juru Bicara KPK Johan

Budi S.P. di Jakarta kemarin (15/11).

Dia belum bersedia menjelaskan detail laporan tersebut. "Belum ada informasi mengenai hal itu," ujarnya.

Meski diserahkan pejabat negara, laporan

dari Dipo tidak diterima langsung pimpinan KPK. Dipo diterima pejabat dari Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK ■

► Baca KPK... Hal 19

Kemenag Bakal Lindungi Staf dari Manuver

■ **KPK...**

Sambungan dari hal 1

Sementara itu, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah terhadap kementerian yang dilaporkan Dipo ke KPK tetap harus dijaga. Namun, dia tidak menjawab tegas apakah laporan Dipo ke KPK tersebut atas sepengetahuan Presiden SBY.

Dia hanya mengungkapkan bahwa semua telah melalui prosedur. Bermula dari aduan atau laporan yang diterima Seskab dan kemudian dikaji. "Atas dasar itulah kita bekerja. Dan, jelas kita tidak boleh hanya menduga-duga," katanya diplomatis.

Di bagian lain, langkah Dipo membawa aduan permainan anggaran oleh staf khusus menteri mulai membuat panas dingin sejumlah kementerian. Salah satu kementerian yang dipimpin menteri dari parpol adalah Kementerian Agama (Kemenag).

Kementerian berslogan Ikhlas Beramal itu dipimpin Ketua Umum PPP Suryadharma Ali.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag Muhammad Jasin menuturkan, dirinya sudah mendengar upaya pelaporan Dipo Alam itu. "Meski di situ disebutkan kementerian yang dipimpin orang partai, saya tidak bisa menyimpulkan di antaranya adalah Kemenag," ujar mantan pimpinan KPK tersebut kemarin.

Dia menyatakan, sebagai pengawas internal kementerian, dirinya bekerja berdasar Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 10 Tahun 2010. Dalam ketentuan tersebut, dia mengawasi segala bentuk kinerja seluruh PNS di lingkungan Kemenag. Terutama kinerja yang berkaitan dengan penggunaan uang negara dan pelayanan masyarakat.

Terkait dengan keberadaan staf khusus menteri dari partai yang ramai disebut bermain APBN dan calo mutasi serta

promosi jabatan, Kemenag memang bisa disorot. Sebab, ada salah seorang staf khusus Menag yang juga ditarik dari internal partai. Tentang keberadaan staf khusus yang rawan bermain itu, Jasin menegaskan akan terus memantaunya.

Namun, secara struktural, dia tidak bisa mengawasi hingga menindak secara tegas staf khusus tersebut. "Mereka itu *kan* bukan pegawai (PNS, Red) Kemenag. Jadi, tanggung jawab staf khusus itu langsung ke menternya," paparnya.

Jasin menegaskan, PNS Kemenag harus dilindungi dari segala bentuk manuver yang melanggar hukum. Baik itu manuver dari internal pegawai atau PNS Kemenag maupun manuver dari pihak luar yang ditarik ke internal Kemenag. Menurut dia, manuver kotor tersebut bisa merusak sistem Kemenag yang saat ini mulai diporalisasi...

Di tempat terpisah, anggota Komisi III DPR Bambang So-

esatyo berharap laporan Dipo Alam didukung bukti-bukti kuat agar proses hukumnya bisa ditindaklanjuti KPK. Kalau sekadar membuat sinyalemen, itu hanya menimbulkan kegaduhan. "Ingat, akhir-akhir ini pemerintah, termasuk Kantor Presiden, sudah beberapa kali membuat gaduh," kata Bambang di Jakarta kemarin.

Menurut dia, Kantor Presiden membuat gaduh dengan kontroversi pemberian grasi kepada terpidana mati kasus narkoba, Franola alias Ola, sehingga menjadi sasaran kecaman publik. "Lalu, Dipo tampil dengan isu kongkalikong DPR dan kementerian dalam penyusunan APBN," ujarnya.

Kalau kedatangan Dipo ke KPK tidak membawa bukti-bukti permulaan yang memadai, laporan dia selama ini dianggap tak lebih dari upaya atau manuver mengalihkan berbagai isu yang memojokkan istana. (sof/fal/wan/bay/c5/ttg)

POLITIK & HUKUM

KPK Telaah Laporan Dipo Alam

Dahlan Iskan Sebaiknya Juga Laporkan ke KPK

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi masih menelaah laporan Sekretaris Kabinet Dipo Alam tentang dugaan permainan anggaran di tiga kementerian dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. KPK harus memverifikasi dan memvalidasi laporan tersebut.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP, Kamis (15/11) di Jakarta, mengatakan, jika hasil verifikasi dan validasi itu mengarah pada terjadinya tindak pidana korupsi, KPK dipastikan membuka penyelidikan baru.

Rabu (14/11) malam, Dipo melaporkan dugaan permainan atau kongkalikong anggaran di tiga kementerian, disertai dokumen pendukung, ke KPK. Baik Dipo

maupun KPK belum mengungkapkan kementerian apa saja yang diduga terlibat kongkalikong ini, ataupun siapa anggota DPRnya.

Dipo mengatakan, potensi penyelewengan di tiga kementerian itu tidak selalu menimbulkan kerugian negara. Langkah melapor ke KPK merupakan bagian dari upaya pencegahan sebelum terjadi kerugian negara.

"Kami mendapatkan laporan itu dan (praktik kongkalikong yang merugikan negara) dapat dicegah," katanya.

Dipo menegaskan, laporannya itu bukan fitnah karena sumbernya jelas, yakni dari para pe-

gawai negeri sipil yang mengetahui praktik tersebut. Laporan tertulis dari PNS itu sudah dicek ke pelapor, pejabat di kementerian, juga menteri.

Sebelumnya, Dipo mensinyalir adanya praktik korupsi tersistematis di kementerian. Beberapa pihak diduga terlibat dalam praktik kongkalikong yang berpotensi menggerus APBN, antara lain oknum staf khusus menteri, oknum anggota DPR, serta rekanan.

Terkait penyelidikan KPK

Sejauh ini, menurut Johan, sejumlah kasus yang ditangani KPK memang berpangkal pada permainan anggaran antara kementerian dan anggota DPR. Sejumlah kasus yang dibawa ke pengadilan tindak pidana korupsi dengan jelas menggambarkan permainan anggaran itu, seperti dugaan suap dalam pembahasan anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dipo Alam, Sulkarnaen Djabar, sebagai tersangka anggota Fraksi Partai



ANTARA/WAHYU PUTRO A

Sekretaris Kabinet Dipo Alam keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai melaporkan dugaan penyelewengan anggaran oleh oknum DPR dan kementerian, Rabu (14/11) di Jakarta.

Demokrat, Angelina Sondakh. Dalam kasus korupsi pengadaan Al Quran dan laboratorium komputer madrasah di Kementerian Agama, KPK menetapkan anggota DPR dari Fraksi Partai Goldidikan dan Kebudayaan, Dipo Alam, Sulkarnaen Djabar, sebagai salah satu tersangka.

Sekretaris Jenderal Partai Peratuan Pembangunan Romahurmuzyi berharap laporan Dipo benar-benar berdasarkan bukti dan fakta yang jelas.

Langkah Dipo tersebut diapresiasi anggota DPR Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Didi

Irawadi Syamsuddin. Dia mengharapkan langkah itu juga dilakukan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan.

Johan juga berharap demikian. "Jadi, sebaiknya Pak Dahlan jangan berpolemik di media," katanya. (BIL/WHY/OSA/NTA)



Lihat Video Terkait
"Dahlan Iskan soal Laporan ke KPK" di
vod.kompas.com/dahlansoalkekkpk

SKRIPSI